

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar**

##### **2.1.1. Pengawasan**

Pelaksanaan suatu kegiatan atau jalannya suatu organisasi harus menghadapi banyak masalah dan penyimpangan. Masalah-masalah yang didapat tidak hanya dari dalam organisasi/perkumpulan tetapi juga didapat dari datangnya dalam organisasi/perkumpulan itu sendiri. Untuk menghilangkan/mengurangi gangguan yang telah disebabkan oleh masalah atau penyimpangan-penyimpangan serta mengupayakan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Oleh sebab itu, perlu mengadakan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan organisasi maka dari itu perlu mengadakan pengawasan. Terry (Syafie 2017 : 82) Mengatakan pengawasan ialah merupakan “ standarisasi yang akan harus dicapai dalam proses penentuan yang dapat dirumuskan dalam pengawasan dan apa saja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, yaitu suatu implementasi, menilai implementasi dan bila perlu dilakukan perbaikan, sehingga implementasi sesuai rencana, yang menyesuaikan dengan standar atau ukuran”.

Penjelasan diatas telah dijabarkan dan Terry telah mencoba menjelaskan untuk pengawasan adalah suatu usaha atau bisnis yang memiliki urutan bagaimana tentang tahap suatu perkumpulan atau organisasi dan perusahaan melakukan kegiatannya sehingga akan selalu ada jalur yang bersamaan. Dengan tujuan dan keinginan suatu perusahaan. Terry juga menjelaskan 18

pengawasan untuk berupaya mencakup dan memperbaiki kesalahan selama yang ditemukan sehingga pengawasan tersebut melakukan perbaikan agar mendapatkan solusis.

Fahmi (2012), FremontKast dan James.Rosenzweig juga menambahkan seperti teori umum lainnya, bahwa teori pengawasan tersebut lebih merupakan keadaan pikiran daripada kombinasi matematika metode spesifik, terkeologi atau ilmiah.Sedangkan pengawasan menurut GR Terry dalam Fahmi (2012) proses penentuan sebagai defenisi apa yang akan dicapai ialah standar apa saja yang akan dilakukan ialah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan jika perlu dilakukanya perbaikan, sehingga pelaksanaanya dapat mengevaluasi sesuai rencana yang telah ditentukan sesuai standar.Hani Handoko dalam Fahmi (2012) yang menyatakan pengawasan dapat dijelaskan dan di defensikan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan tercapainya suatu manajemen. (Monjelat et al., 2018)

Menurut pendapat Urwick (Syafiee, 2017: 82) pengawasan merupakan upaya untuk sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang ada dan instruksi yang sudah ditetapkan yang sudah dikeluarkan. Pengawasan yang dijelaskan oleh Urwick menekankan bahwa aturan dan instruksi yang sudah ditentukan merupakan tolok untuk mengukur dalam menjalankan suatu kegiatan. Hal ini sejalan pendapat dari Fayol(Syafiee, 2017:82) pengawasan bahwa hal ini merupakan tekat atau ketetapan untuk menguji setiap perjanjian dan persetujuan yang telah di sesuaikan melalui prinsip dari perencanaan dan instruksi yang tidak bisa di hindarilagi.

Bersamaan dengan pendapat yang telah di jelaskan siaguan (2012: 125) mengatakan ialah pengawasan merupakan suatu pengamatan berjalanya suatu kegiatan organisasi/ perkumpulan agar dapat memastikan bahwa semua pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penjelasan dan pendapat ini menekankan bahwa pengawasan memberikan jaminan bahwa semua pekerjaan yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan.

Adanya penekanan dinyatakan oleh Robi (Syaffie, 2017:83) untuk memastikan bahwa adanya pengawasan juga dapat dinyatakan sebagai suatu proses kegiatan yang akan dan perlu dipantau untuk dapat memastikan semuanya dapat berjalan sesuai yang akan direncanakan dan agar dapat mengoreksi setiap divisi yang jelas. Penjelasan ini berarti pengawasan dapat dijelaskan sebagai sesuatu kegiatan untuk perkembangan proses dan untuk memastikan jalannya sebuah pekerjaan, agar bisa diselesaikan dengan sempurna seperti yang direncanakan sebelumnya dan memperbaiki beberapa pemikian yang dapat saling berhubungan.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pendapat para ahli yang sudah menjelaskan bahwa pengawasan itu merupakan proses dari pengamatan yang disertai dengan koerksi untuk berupaya memastikan pekerjaan yang tetap pada jalur yang telah ditentukan.

### **2.1.2 Hakikat Pengawasan**

Suatu kegiatan untuk melakukan upaya suatu pengawasan yang menghasilkan suatu hasil yang telah di harapkan, dan alasan medasar untuk memberikan perhatian serius. Berikut adalah sifat pengawsan yang diajukan oleh siagian (2012: 126:128):

1. Orientasi kinerja adalah efisiensi di setiap organisasi.
2. Orientasi adalah efektifitas yang kedua dalam melaksanakan suatu penyelenggaraan sebagai kegiatan oprasional.
3. Orientasi kerja yang ketiga ialah produktivitas.
4. Pengawasan untuk melakukan kegiatan yang sedang berlangsung dan dimasukan untuk melakukan pencegahan dari tindakan penyimpangan, pemborosan dan penipuan.
5. Tidak ada satupun manager yang dapat dilakukan untuk menghindari tanggung jawab suatu pengawasan karena eksukutor/pelaksanaan ialah manusia yang tidak sempurna dan luput dari suatu kesalahan.
6. Suatu pengwasan akan berjalan sangat lancar jika suatu proses dari dasar (Penentuan standar dari kerja, pengukuran hasil dari suatu pekerjaan dan koreksi kemungkinan adanya suatu penyimpangan) pengawasa diketahui dann akan di patuhi.

### **2.1.3. Mekanisme Pengawasan**

Setiap bentuk suatu pengawsan selalu saja membutuhkan suatu kerangka dan acuan dengan kata lain keseluruhan dari padangan konsistensi untuk menjunjung tinggi sebuah kebenaran tidakan yang akan diambil oleh penyedia-

penyedia dan suatu pelaksana kinerja yang akan selalu diawasi. Pengawasan tidak akan terjadi atau dengan kata lain hanya berjalan sesuai kehendak ataupun keinginan pengawasan itu sendiri, akan tetapi harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang akan dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya, mekanisme dan prosedur kinerja bisa didasarkan pada ketentuan-ketentuan suatu bentuk atau peraturan instusional yang telah ditentukan dan dipergunakan sebagai pedoman untuk rangka sebuah suatu kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang didapat dalam sebuah institusi itu sendiri (Makmur, 2011:183-185).

#### **2.1.4 Tipe-Tipe Pengawasan**

Organisasi setiap tipe-tipe memiliki tipe yang berbeda sesuai dengan kegiatan serta tujuan yang dilakukan oleh masing-masing suatu organisasi. Dan sama juga dengan sebuah pengawasan, pengawasan yang telah dilakukan akan disesuaikan dengan apa yang akan diawasi dari tujuan pengawasan yang dilakukan, dan situmorang serta juhir (1994) dalam islamiah (2016:3) Mengklarifikasikan dan menjelaskan beberapa pengawasan sebagai berikut :

1. Supervisi yang langsung dan supervisi yang tidak langsung definisi supervisi langsung adalah pengawasan "di tempat" di mana pengawasan ini telah dilakukan oleh pimpinan atau penyelia, sedangkan definisi dari pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan "*on the spot*" dimana pengawasan ini yang secara tidak langsung melalui laporan secara tertulis.
2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif pengawasan ini yang telah berkaitan melalui waktu dalam pelaksanaan pengawasan. Yang

dimaksudkan pengawasan ialah pengawasan untuk mencegah pelanggaran yang telah dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan. Sedangkan defenisi pengawsan repretif adalah pengwasan setelah selesainya suatu kegiatan. Selain itu, Makmur (2011:185:188) juga menjelaskan beberapa adanya perbedaan jenis pengaawasan berdasarkan peran pengawasan. Berikut ini adalah beberapa jenis pengawasan :

- a. Pengawasan fungsional yang membutuhkan suatu pekerja manusia yang telah memiliki pengetahuan khususnya dan pekerjaan khususnya dibidang pengawasan.
- b. Pengawasan Barang adalah Pengawasan Barang upaya yang talah dilakukan secara sadar agar dapat menjamin suatu keamanan sebuah barang. Pentingnya suatu pengawasan barang ialah untuk menciptakan kejelasan dan jaminan untuk semua yang terkait dengan barang.

### **2.1.5 Proses Pengawasan**

Impelmentasi suatu pengawasan ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan agar pengawasan dapat berjalan dan berkerja dengan baik. Menurut Handoko (2017:360:362) proses pengawasan baisanya terdiri dari lima tahap (langkah). Tahapan pertama ialah mengawasi pengaturan standar implementasi. Standar menyiratkan sebagai unit pengukuran yang telah digunakan yang berarti pengukuran yang dapat digunakan sebagai bentuk "tolok ukur" penilaian darri hasil. Sasaran, kuota, sasaran target, standar implementasi dapat digunakan sebagai suatu standar.

Penentuan pengukuran suatu pelaksanaan kegiatan dan menetapkan standar yang tidak berguna jika tidak diikuti dengan berbagai macam cara untuk mengukur suatu kegiatan pelaksanaan yang jelas dan nyata. Oleh karena itu, tahapan kedua dari implementasi ialah menentukan pengukuran implementasi, implementasi target acara yang sesuai yang akan diukur implementasi aktivitas yang nyata. Selesai frekuensi yang akan diukur dari sistem pemantauan yang telah ditentukan ditentukan, pengukuran implementasi dilakukan sebagai suatu proses yang berulang dan berkelanjutan. Berikut berbagai macam cara untuk mengukur implementasi, sebagai berikut:

1. Observasi atau Pengamatan
2. Laporan Lisan, Laporan Tertulis maupun laporan lainnya
3. Metode-metode otomatis
- 4 Pengujian atau test, inspeksi atau dengan pengambilan sampel.

Sangat banyak perusahaan menggunakan auditor internal untuk sebagai suatu pelaksanaan sebuah Pengukuran. Perbandingan untuk pelaksanaan kegiatan dengan standarisasi atau analisis penyimpangan. Tahap kritis dari suatu proses pemantauan ialah perbandingan implementasi yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

Meskipun tahapan ini adalah yang paling sangat mudah untuk dilakukan, kompleksitas bisa terjadi ketika menafsirkan suatu penyimpangan-penyimpangan yang harus dan dapat di analisis untuk menentukan mengapa suatu standar tidak akan dapat dicapai. Mengambil tindakan korektif jika perlu, jika hasilnya

menunjukkan perlunya tindakan korektif, tindakan ini harus diambil. Tindakan korektif dapat diambil dalam berbagai macam bentuk. Standar dapat diubah, implementasi ditingkatkan, atau keduanya dilakukan bersama-sama, tindakan koreksi berupa:

1. Mengubah default pada awalnya yang mungkin terlalu rendah atau hingga terlalu tinggi.
2. Mengubah pengukuran untuk melakukan pelaksanaan (inspeksi frekuensi yang sering atau sangat berkurang atau mengganti sistem pengukuran itu sendiri)
3. Mengubah satu cara untuk menganalisis dan menafsirkan penyimpangan.

Teknik pengawasan supervisi yang efektif membutuhkan teknik yang tepat dan dapat disesuaikan dengan objek yang telah dipantau sehingga output ini dapat memberikan manfaat untuk mencapai suatu tujuan pengawasan. Berikut ini ialah dua teknik yang dikemukakan oleh Makmur (2011:192):

- a. Teknik inspeksi/pemeriksaan di dalam pengawasan tidak akan ada pengawasan tidak melakukan inspeksi karena melalui suatu pemeriksaan yang akan diperoleh sumber informasi atau informasi yang sangat jelas dan mengandung suatu kebenaran.
- b. Teknik pelaporan dalam suatu pengawasan laporan tersebut sebenarnya merupakan salah satu objek dari suatu pelaksanaan suatu pengawasan yaitu masalah pengawasan itu sendiri hanya mempercayai sebuah pengawasan, terkadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sebenarnya. Laporan pengawasan harus informatif agar dapat mudah dipahami.

Karakteristik pengawasan yang efektif dalam suatu pengawasan efektif yang dapat membantu usaha agar dapat membantu pekerjaan yang telah direncanakan supaya dapat memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah berlangsung sesuai dengan perencanaan (Terry, 1986: 396). Siagian (2012: 130-135) dalam bukunya ia telah menjelaskan bahwa pengawasan

Pengawasan yang telah berlangsung efektif apabila telah memiliki berbagai jenis ciri sebagai berikut :

- a. Sebuah pengawasan harus mencerminkan apa yang dilakukan agar mencerminkan sifat dari berbagai kegiatan, yang dimaksud adalah bahwa harus komplitabel dengan teknik pengawasan dengan lainnya melakukan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan dan kegiatan pengawasan apa yang telah dilakukan dan ditargetkan.
- b. Pengawasan harus memberikan panduan tentang kemungkinan penyimpangan teknik pelaporan dalam suatu pengawasan. Laporan tersebut sebenarnya adalah salah satu objek dari suatu pelaksanaan pengawasan, yaitu masalah pengawasan itu sendiri hanya mempercayai laporan, terkadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sebenarnya. Laporan pengawasan harus informatif agar mudah dipahami.

Karakteristik Pengawasan Efektif suatu Pengawasan efektif dapat membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang telah direncanakan untuk memastikan bahwa suatu pelaksanaan pekerjaan tersebut telah berlangsung sesuai dengan perencanaan (Terry, 1986: 396). Siagian (2012: 130-135) dalam

bukunya ia menjelaskan bahwa pengawasan yang akan berlangsung efektif apabila telah memiliki berbagai ciri yang sebagai berikut ini.

- a. Suatu teknik pengawasan harus kompatibel seperti melakukan yang mencerminkan berbagai sifat dari suatu kegiatan yang telah dilakukan serta telah ditargetkan oleh pengawasan.
- b. Pengawasan yang telah diberikan harus sesuai panduan agar tidak ada terjadi seperti penyimpangan dari sebuah perencanaan. Penyimpangan yang terjadi harus di deteksi dengan cara melakukan pengawasan dan penyimpangan yang sedang terjadi atau mungkin saja terjadi belum tentu akan menjadi kenyataan. Upaya untuk mendeteksi penyimpangan secepatnya harus dilakukan untuk mengambil tindakan pencegahan harus segera mungkin menghubungi manager yang telah bertanggung jawab.
- c. Pengawasan Harus menentukan pada titik strategis tertentu. Karena keragaman / kesamaan kegiatan dan karena ruang lingkup tanggung jawab yang luas, seorang manager harus dapat menentukan kegiatan apa yang di perlukan dia lakukan sendiri dan kegiatan apa yang harus dibagikan kepada Masyarakat.
- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Dalam diskusi karena penekanan bahwa dalam satu komponen yang harus jelas dilihat dalam 26 rencana adalah standar kinerja kerja yang akan diharapkan terpenuhi oleh pelaksanaan kegiatan operasional, standar ini harus sangat jelas dilihat tidak hanya dalam prosedur atau mekanisme, tetapi juga dalam seperangkat kriteria yang telah menggambarkan persyaratan kuantitatif dan dinyatakan secara tertulis sejauh mungkin.

- e. Memantau fleksibilitas. Fleksibilitas pengawasan berarti bahwa pengawasan harus dilanjutkan bahkan jika organisasi menghadapi perubahan karena keadaannya tidak terduga atau bahkan jika terjadi kegagalan. Jika aspek-aspek tertentu dari rencana mengalami kegagalan atau perubahan, pengawasan harus segera melaporkan kegagalan dan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pemantauan.
- f. Pengawasan itu harus memperhitungkan bagian pola dsar dasar suatu organisasi pola dasar dan jenis organisasi / asosiasi ditentukan di mana ada berbagai masalah diakomodasi seperti pembagian tugas, pendegeasian sebuah wewenang, pola akuntabilitas, saluran komunikasi dan jaringan informasi tertentu.
- g. Implementasi pengawasan yang efisien pengawasan telah dilakukan sehingga semua asosiasi / organisasi berkerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi.
- h. Memahami sistem pemantauan oleh semua pihak yang ikut berpartisipasi, manager sebagai tim pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui pengawsan pengawasan apa yang mereka butuhkan dan alat apa yang mereka perlu kuasai dan miliki, pengawasan untuk menemukan apa yang salah. Ini berarti bahwa fokus utama adalah upaya untuk menemukan dan menemukan apa yang salah dalam organisasi, terutama jika ada penyimpangan dari sebuah rencana yang sudah ditentukan meskipun jarang ada peristiwa yang membenarkan penyimpangan ini.

- i. Pengawasan harus menjadi pembimbing, jika telah ditemukannya bahwa apa yang terjadi salah dan siapa yang salah dan tahu akan penyebabnya, seorang manager harus memiliki keberanian untuk mengambil tindakan yang paling tepat sehingga kesalahan yang dilakukan oleh bawahan tidak terulang lagi, bahkan pengenaan sanksi dalam bentuk hukuman, jika perlu, harus melakukan sesuatu sesuai ketentuan yang berlaku yang berlaku. (Efektivitas, Besar, Kedokteran, & Makanan, 2018).

#### **2.1.6. Unsur-unsur kelembagaan pengawasan**

Bagian dari sebuah organisasi ialah faktor yang telah digunakan untuk mencapai tujuan ialah adanya unsur dari lembaga di bidang pengawasan. Berikut penjelasan elemen-elemen pengawasan dari kelembagaan menurut Makmur (2011:250-2552):

1. Unsur Kerja Manusia

Kemajuan salah satu lembaga ditentukan oleh keterampilan dan profesionalisme serta memberikan kemampuan pengetahuan untuk pimpinan dan lembaga manager yang telah bersangkutan. Banyak yang telah beranggapan bahwa unsur manusia adalah pemegang peran penting dalam suatu lembaga yang bergerak di bidang pengawasan atau yang bergerak dibidang pengawasan atau bergerak juga dibidang lainnya, karena semua manusia juga dapat mennetukan keberhasilan suatu tujuan dan manusia itu sendiri dapat juga menghambat suatu pencapaian tujuan kelembagaan.

## 2. Elemen Menggunakan Uang.

Seperti yang sesama kita pahami bersama-sama, keberhasilan suatu kegiatan kelembagaan yang cukup berpengaruh didalamnya menyangkut juga kejelasan mekanisme kinerja yang ditentukan terlebih dahulu, baik secara tidak tertulis maupun tertulis. Mekanisme kinerja ialah prosedur yang harus dilalui sehingga selain pelaksanaan pekerjaan yang akan memuaskan jika membandingkan suatu kegiatan yang tidak jelas .

## 3. Elemen penerapan mekanisme aksi.

Seperti yang kita pahami bersama, keberhasilan suatu kegiatan suatu kelembagaan/ kelembagaan yang cukup berpengaruh didalamnya menyangkut kejelasan mekanisme kerja ditentukan terlebih dahulu, baik secara tertulis maupun tidak. Mekanisme kerja adalah prosedur yang harus dilalui sehingga selain pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis, ada juga kemungkinan memberikan hasil yang lebih memuaskan jika kita membandingkan suatu kegiatan yang tidak jelas tentang mekanisme kerja yang harus dilakukan di luar.

## 4. Elemen menggunakan perlengkapan kantor

Suatu pekerjaan dengan teknis setiap kegiatan di institusi baik yang telah terkait dengan pengawasan ataupun kegiatan lainnya.

## 5. Kelengkapan dokumen

Elemen utama yang selalu mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan, ialah kelengkapan dokumen yang selalu berkaitan dengan suatu pelaksanaan tugas serta fungsi utama serta menjadi suatu bukti di sepanjang kehidupan lembaga terkait baik yang internal maupun eksternal.

Mengecek setiap kelengkapan dokumen dapat digunakan sebagai kebenaran untuk pemantauan serta sebagai bukti historis.

6. Keakuratan system kerja

Keakuratan system kerja dapat mengalami berbagai kendala yang sangat mungkin bahwa akan adanya kegagalan yang dicapai jika tujuan kelembagaan mengimplementasikan suatu jenis perkerjaan dalam suatu perkerjaan.

7. Elemen kepemimpinan.

Kegiatan pengawasan dalam melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan ialah salah satu faktor penentu keberhasilan yang menunjang prilaku dan gaya kepemimpinan yang telah di tentukan.

8. Elemen bawahan.

Peran bawahan di dalam suatu lembaga mempunyai tingkat yang berbeda dalam hal kesanggupan di berbagai bidang salah satu dibidang sains maupun dalam hal kemampuan yang mereka miliki, semua ini menentukan kualitas pekerjaan bawahan.

9. Unsur ketepatan waktu.

Semua kegiatan kelembagaan selalu membutuhkan waktu implementasi yang tepat, karena kesalahan dalam menetapkan waktu juga dapat mengakibatkan kegagalan kegiatan di lembaga tersebut.

Suatu unsur kegiatan kelembagaan selalu membutuhkan waktu pelaksanaan yang cepat dan efisien, karna suatu kesalahan dalam menetapkan ketetapan juga dapat mengakibatkan kegiatan kegagalan dilembaga tersebut. Dan suatu pola dinamis yang beroperasi serta berkembang yang telah sesuai pada pola

pikir manusia. Apabila pola pikir manusia selalu diperkuat dengan adanya ilmu pengetahuan serta teknologi maupun keterampilan bisa melakukan menjadi kinerja yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dapat di pastikan bahwa dinamikan semakin maju dan kelembangaan akan di semakin diperkuat dan tidak ada yang sulit didalam suatu pengawasan.

### **2.1.7 Indikator Pengawasan**

Menurut Handoko (2012:373) merupak hal yang sangat penting dalam penelitian ini Handoko menjelaskan dalam bukunya yang berjudul karakteristik pengawasan dari management yang sangat efektif dan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Akurat** : Pelaksanaan tentang informasi kegiatan yang sangat akurat. Tindakan korektif dapat menyebabkan data yang tidak akurat dari sebuah sistem pengawasan atah bahkan tindakan tersebut dapat menyebabkan dan menciptakan masalah yang tidak benar-benar terjadi.
2. **Tepat Waktu** : Suatu informasi yang harus di evaluasi, disampaikan serta dikumpulkan dan segera dilakukan jika adanya kegiatan perbaikan.
3. **Terkonsentrasi pada poin-poin pengawasan strategis** : Kerusakan fatal akibat dari standar penyimpangan yang tidak di fokuskan pada suatu sisitem pengawasan.
4. **Objektif dan komperhensif** : informasi yang lengkap serta harus mudah dipahami oleh orang lain.
5. **Bersifat Realistis secara ekonomi** : Pemantauan yang tidak tinggi dan setidaknya semacam fasilitas adalah penerapan sistem dan di dapatkan dari sistem itu sendiri.

6. **Realisme Organisasi** : suatu kenyataan dari organisasi harus ada sistem pemantauan yang kopatibel.
7. **Di Koordinasikan dengn alur kerja organisasi** : alur kerja organisasi harus di koordinasikan dengan informasi pengawasan, setiap tahapan proses yang pertama ialah akan di pengaruhi kegagalan dan keberhasilan seluruh perbaikan yang keduam menjagkau semua personel yang dibutuhkan untuk informasi pengawasan.
8. **Fleksibel** : untuk merespons dan bereaksi atas suatu ancaman dari peluang lingkungan pengawasan harus memiliki fleksibilitas.
9. **Apakah sebagai panduan dan oprasional** : tindakan yang diambil atas tindakan korektif sebelumnya adalah sistem dari pengawasan yang efektif.
10. **Diterima oleh Anggota Organisasi** : tanggung jawab dan prestasi ialah yang mendorong perasaan otonom dan pelaksanaan kerja suatu sistem pengawasan yang lurus dapat di arahkan perkerjaanya.

Oleh karna itu organisasi yang konsisten dan pengaawasanya pun harus di pertimbangkan starndar yang akan ditetapkanya dari 10 karakteristik yang di atas (Di&Serang, 2017)

### **2.1.8 Faktor yang di pengaruhi pengawaasan**

Abdurrahman dan Syafie (2011:110) menjelaskan beberapa faktor untuk mencegah segala macam kasus penyalahgunaan dan wewenang dan berikut beberpa faktor yang dapat membantu :

1. Kebijakan diterapkan
2. Mendukung anggaran pembiayaan

3. Penempatan karyawan dan prosedur kerja
4. Stabilitas koordinasi dalam organisasi

Berdasarkan apa yang dinyatakan di atas, pengawasan itu membutuhkan pemikiran yang sudah terbiasa dengan lingkungan dan ditanamkan rasa percaya dan yakin kepada seseorang dan agama sehingga semua orang dapat melaksanakan suatu perintahnya sebagai orang yang akan bertanggung jawab atas masalah-masalahnya maupun yang ia kerjakan. Begitupun setiap tindakan atau perlakuan yang telah dilakukan akan di hargai serta percaya setiap yang dikerjakan akan selalu di perhatikan dan di hargai.

Agar tidak melanggar kebijakan yang telah ada harus melakukan pekerjaan sesuai kebijakan-kebijakan yang telah ada. Setiap kegiatan dan kebutuhan akan mempermudah penyedia biaya dan anggaran agar setiap proses yang ada didalam pengawasan tidak terhambat. masa-masa sulit karyawan dapat menanganinya dengan baik dan tepat agar melakukan pekerjaan sesuai keahliannya dan sesuai tempat yang dibutuhkannya serta merasa mampu akan kemampuannya sendiri. (Jurusan, Wicara, & Surakarta, 1998)

## **2.2 Pengawasan BPOM**

Badan POM No. 30 tahun 2017 Peraturan berdasarkan tentang Masuknya pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Indonesia yaitu pengawasan obat-obatan serta kosmetik yang dilakukan yang melewati pengawasan produk dan fasilitas yang sama dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di undang-undangan pengawasan yang telah dilakukan untuk dapat kepastian obat-obatan yang sesuai serta makanan yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya Batam

dengan data yang terkandung dalam dokumen impor dan yang patuh terhadap hukum dan peraturan pemerintah.

Analisis rasio yang telah dilakukan berdasarkan realisasi data dari pengawasan obat dan makanan yang dapat dilakukan dan berdasarkan realisasi data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga terkait/kementrian dapat berkoordinasi dengan Balai Badan POM. Berikut 3 pilar pengawasan yang telah dilakukan oleh Balai Badan POM :

1. Pengawasan dilakukan oleh bisnis, yaitu memastikan bahwa obat-obatan dan makan yang terjamin, berkasiat/serta mempunyai manfaat dan berkualitas baik dan adanya pemberitahuan seperti yang telah di berikan saat mendaftar atau terdaftar pada Badan POM.
2. Pengawasan dilakukan oleh Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nasional menncapai aspek yang sangat meluas, dimulai dari suatu proses penyusunan standarisasi untuk fasilitas dan produksi, mengevaluasi produksi terdaftar serta mengeluarkan Nomor Lisensi Distribusi (NIE), pemantauan kemudian tanda iklan, mengambil serta menguji sampel produksi di fasilitas pengiriman/distribusi, inspeksi produksi dan fasilitas distribusi, pengawasan produksi, hingga pencarian awal dan penegakan hukum dari berbagai macam orang yang menyimpang dari mode produksi dan distribusi, serta distribusi produk yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Pemantauan telah masyarat lakukan untuk mengamankan dan menjaga diri dari produk yang berisiko terhadap keamanan masyarakat. Agar dapat

tercapai, Dewan Balai Badan POM melakukan Komunikasi, Informasi serta Pendidikan (KIE) kepada publik.

Menurut data BPOM yang telah di akses pada 28 September 2019 dari situs web ([www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)) berikut system dasar dari prinsip yang di control Badan BPOM meliputi :

1. Langkah-langkah keamanan yang tanggap, aman, efektif dan professional.
2. Langkah diambil yang di didasarkan resiko dan peningkatan berdasarkan bukti ilmiah.
3. Ruang pengawasan BPOM komperhensif, proses yang telah dicakup meneyluruh.
4. Jaringan internasional dengan sekala nasional/lintas.
5. Supermasi Hukum dan supermasi otoritas yang ada.
6. Kolaborasi jaringan global yang koheresif dan kuat serta memiliki jaringan laboratorium nasional.
7. Memiliki keselamatan dari jaringan kualitas produksi dan system informasi. (Larkin BPOM, 2016:2)

### **2.3 Kosmetik**

Kosmetik mempunyai pengertian dan berasal dari bahasa kosmein (yunani) yang diartikan sebagai “hiasan” suatu alat yang dapat digunakan untuk menghias dan mempercantik diri dan dicampurkan oleh bahan alami didalamnya sebelum dicampurkan yang ada didekatnya. Sekarang bahan yang alami sudah

jarang ditemui kebanyakan sudah tercampur bahan yang dapat meningkatkan kecantikan wanita (wasitaatmaja, 1997:26)

Persyaratan teknis kosmetik yang di atur dalam PerKBBPOM nomor 19 tahun 2015 telah menjelaskan kosmetik adalah alat atau bahan untuk persiapan yang dicampurkan lalu dimasukkan untuk digunakan di bagian-bagian tubuh manusia (kuku,bibir, rambut, epidermis, internal maupun eksternal) maupun gigi dan selaput lender sekitar mulut. Tujuan utamanya untuk dilihat melalui indra maupun dicium melalui indra, dapat untuk mengubah penampilan serta memperbaiki badan yang berbau, melindungi kondisi tubuh agar selalu dalam kondisi baik.

Kosmetik tersebut bermanfaat dalam penjelasan yang sesuai tentang makna kosmetik, kosmetik tersebut bukan sebatas make up/ kosmetik, banyak manfaat yang akan di dapatkan dengan menggunakan kosmetik saja dan tidak hanya berfungsi untuk mempercantik diri, berikut ini manfaat dari kosmetik yang dijelaskan oleh (wasitaatmaja, 1997: 63-65) :

1. Sebagai parfum atau sumber wewangian meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi bau badan yang tidak enak dan kurang menyenangkan jika tercium oleh orang lain.
2. Meningkatkan penampilan yang berasal dari Dekorasi dan tata rias.
3. Berfungsi untuk perawatan dan merawat kulit untuk pencegahan penyebab kulit yang berkelainan, perawatan dan merawat kulit terdiri dari beberapa kosmetik yaitu penipisan, perlindungan pembersih dan pelembab.

4. Meningkatkan kosmetik yang digunakan Obat dan kosmetik yang dibuat serta mengandung zat yang dapat berkerja lebih dalam yang biasa digunakann sbagai obat misalnya belerang,hexachlorophene, merkuri maupun hormone.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah dijadikan sebagai pedoman bagi penulis agar melakukan penelitiaan sehingga memperkaya teori-teori yang telah di pergunakan penelitian dalam sebuah pengkajian. Berikut daftar penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti :

1. Adapun penelitian yang tekah dilakukan oleh Lina Pangaribuan berjudul efek samping kosmetik dan penangananya bagi kaum perempuan, yang dimuat dalam jurnal keluarga sehat sejahtera, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2017 p-ISSN : 1693-1157 e-ISSN : 2527-9041. Hasil penelitian ini menunjukkan Efek kosmetik pada kulit adalah target utama dalam menerima berbagai pengaruh dari penggunaan kosmetik. Ada dua efek atau efek kosmetik pada kulit, yaitu efek positif dan efek negatif. Lihat dan selanjutnya serta makna yang baik, untuk daftar konten yang terdapat pada label setiap produk kosmetik. Lihat apakah jenis zat di atas terkandung di dalamnya, jika Anda masih ragu, Anda bisa mencarinya di internet tentang bahaya bahan-bahan ini. Jangan pernah tertipu oleh kata-kata alami dan organik pada kemasan produk. Memang, produk-produk ini mengandung satu atau dua bahan organik, tetapi kandungan bahan-bahan berbahaya itu bisa berlipat kali jumlahnya. (Keluarga & Sejahtera, 2017)

2. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Jumba Marlum Simarmata yang berjudul Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan pangan yang mengandung bahan berbahaya di kota Pekanbaru, yang dimuat dalam jurnal *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013 ISSN : 1098-6596. Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk pelaksanaan tugas-tugas BPOM Kota Pekanbaru terkait dengan peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya, merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Pelaksanaan tugas BPOM belum berjalan optimal karena, ada kapasitas masyarakat yang sulit diubah. Kendala dalam pelaksanaan tugas BPOM dalam pengendalian makanan yang mengandung zat berbahaya adalah, terbatasnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak optimal, karena wilayah kerjanya sangat luas dan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin bahan berbahaya dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugasnya. (Bruce, 2013)
3. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ina Nurhayati yang berjudul Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, yang dimuat dalam jurnal *Mimbar Hukum*, Volume 21 Issue 2 Tahun 2012 ISSN : 0852-100X. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pengawasan peredaran produk pangan olahan impor di Indonesia oleh Badan POM belum dapat dikatakan sudah efektif. Masih terdapatnya produk pangan olahan impor ilegal atau yang belum mendapatkan izin edar oleh Badan POM (belum ada tanda

ML) yang beredar bebas di pasar Indonesia, serta masih terdapatnya produk pangan olahan impor yang beredar di Indonesia yang mengandung bahan makanan yang membahayakan kesehatan konsumen, seperti formalin dan melamin, adalah buktinya. Belum efektifnya pengawasan Badan POM terhadap produk pangan olahan impor yang membahayakan yang beredar di pasaran tersebut dapat merugikan konsumen, sehingga perlindungan terhadap konsumen yang menjadi cita-cita yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan menjadi tidak terwujud. (Nurhayati, 2012)

4. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Zubaedah, Indah Laily Hilmi berjudul Peran balai besar pengawas obat dan makanan kota bandung dalam pencegahan dan penindakan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam upaya memberika perlindungan kepada konsumen di Kota Bandung, yang dimuat dalam jurnal vol,positum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018 P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193. Hasil Penelitian ini menunjukkan Peranan Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam pencegahan dan penindakan peredaran peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap sarana Produksi dan Distribusi produk Terapik/Obat, Narkotika Psicotropika Prekursos (NPP) , Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya yang berada di Provinsi Jawa Barat. Dalam Pengawasan Obat dan Makanan tersebut, termasuk di dalamnya adalah pengawasan iklan dan label, sampling dan pengujian produk serta penyidikan, Perlindungan Kepada Konsumen atas Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan

Berbahaya adalah dengan dibentuknya lebih dikenal dengan nama Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). ULPK berfungsi sebagai Pelaksanaan layanan pengaduan konsumen, Pelaksanaan pengolahan data dan evaluasi layanan pengaduan konsumen dan Pelaksanaan bimbingan layanan pengaduan konsumen. Menurut UUPK konsumen juga dapat melakukan Proses Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen. (Hukum & Vol, 2018)

5. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Desi Fatmawati yang berjudul upaya balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) dalam meningkatkan pengawasan obat di kota samarinda dalam jurnal [ejournal.ipfisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ipfisip-unmul.ac.id) Volum 7 Nomor 3 Tahun 2019 ISSN 2477-2458, ISSN 2477-2631 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Standarisasi Kebijakan Teknis Pengendalian Obat yang dilaksanakan oleh POM Pusat di Samarinda telah dilakukan dengan cukup efektif sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Semua standar kebijakan teknis berasal dari POM pusat. POM Pusat di Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah hanya beroperasi sesuai aturan yang ditetapkan. Namun, POM Pusat di Samarinda dapat mengembangkan atau mengeluarkan standardisasi kebijakan sesuai dengan situasi POM Pusat itu sendiri dalam bentuk Surat Edaran dan MoU yang digunakan sebagai pemantauan dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk membuat program pemantauan berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Selain itu, standardisasi kebijakan juga mengatur pelaku usaha dalam memberikan layanan di fasilitas farmasi kepada publik. Pengawasan sebelum memasuki pasar (pra-pasar) telah dilakukan secara

efektif. Namun dalam hal ini, Kantor Pusat POM di Samarinda hanya bertugas melaksanakan hal-hal teknis terkait dengan inspeksi dan pengawasan produk obat-obatan. Pengawasan obat-obatan, terutama obat-obatan keras harus mengikuti beberapa tahap hingga penerbitan izin distribusi Pengawasan setelah memasuki pasar (Pasca-Pasar) yang dilakukan dengan pemantauan dan pengawasan obat-obatan, terutama obat-obatan keras yang telah beredar di pasar. . Pengawasan telah dilakukan dengan cukup efektif yang didukung oleh peningkatan ruang lingkup pengawasan fasilitas distribusi obat yang memenuhi persyaratan dalam uji laboratorium meskipun pelaksanaannya didasarkan pada skala prioritas dengan metode analisis berbasis risiko dan tidak mencakup semua fasilitas yang ada.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

